

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tanggung Jawab Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang sebagai penyelenggara kebijakan PEN belum maksimal dalam mendorong produktivitas kegiatan UKM di Kota Padang. Penyesuaian program terhadap penerapan kebijakan PEN pada sektor UKM meliputi Bantuan Langsung Tunai dan Bantuan Barang, Restrukturisasi Kredit dan menjaga likuiditas bank mitra melalui Program Penempatan Dana, Penjaminan Kredit Modal Kerja untuk UKM melalui Program Penjaminan Pemerintah. Adanya keluhan dari pelaku usaha yaitu, bantuan yang diterima belum dapat digunakan karena kurangnya pembinaan dan pelatihan dalam pembangunan kegiatan usaha dan tidak tersosialisasikan dengan baik tentang program PEN sebagai penunjang kegiatan usaha.
2. Hambatan yang dialami Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang dalam pelaksanaan tanggung jawab sebagai pengelola dari penerapan kebijakan pemulihan ekonomi nasional yaitu masih menggunakan manajemen tradisional dalam melakukan pengolahan data pelaku usaha UKM, rendahnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam pelaksanaan kebijakan terutama dalam pelaksanaan sosialisasi dan pemberian Pendidikan dan pelatihan kepada pelaku usaha, dan koordinasi yang belum maksimal terhadap pembinaan UKM dari pihak

lain yang terkait sebagai pelaksana dari penerapan kebijakan pemulihan ekonomi nasional.

B. Saran

1. Diharapkan Dinas Koperasi melakukan analisis kebutuhan pelaku usaha berdasarkan jenis kegiatan usaha yang dimiliki untuk penerapan kebijakan PEN pada masa pasca pandemi agar pelaku usaha dapat memanfaatkan program ini sesuai dengan tujuan program PEN yaitu melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya.
2. Untuk mendukung penerapan kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional ini lebih baik kedepannya diharapkan Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang lebih mempersiapkan programnya dengan baik dalam segala aspek mulai dari membentuk satuan tugas yang memang ditugaskan untuk menjalankan program ini mulai dari sosialisasi hingga ke proses pemantauan agar tujuan yang telah ditentukan dapat tercapai. Kebijakan penguatan UKM ini diharapkan tidak hanya pada masa pandemi tetapi juga pada masa pemulihan dan pasca pandemi sehingga percepatan pemulihan ekonomi nasional dapat mencapai kestabilannya.